

BAB I **PENDAHULUAN**

I.1 Latar Belakang

Pemekaran merupakan sebuah fenomena yang telah lama terjadi di Indonesia, pemekaran sendiri lahir atas dasar bentuk nyata dari adanya otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan pilar penting dalam sistem pemerintahan Indonesia yang telah memberikan ruang yang luas bagi daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri.¹ Sejalan dengan tujuan utama dilaksanakannya pemekaran yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat pembangunan desa.² Pemekaran daerah seringkali dijustifikasikan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat namun, realita yang sering terjadi seringkali berbeda-beda Pemekaran seringkali dibarengi dengan ekspektasi yang tinggi namun, realitas di lapangan seringkali menunjukkan hasil yang beragam bahkan kontradiktif.

Dilaksanakannya pemekaran tentunya membawa sejumlah implikasi, baik yang bersifat positif maupun negatif terhadap kehidupan masyarakat. Namun Dampak ini sangat bergantung pada kondisi Tata kelola yang ada tata kelola yang baik akan mampu memaksimalkan potensi positif dari pemekaran sebaliknya, tata kelola yang buruk akan memicu berbagai permasalahan. Permasalahan Dampak

¹ Bkpsdmd.babelprov.go.id.2017.Otonomi Daerah Esensi, Tujuan dan Manfaatnya bagi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui melalui <https://bkpsdmd.babelprov.go.id/content/otonomi-daerah-esensi-tujuan-dan-manfaatnya-bagi-provinsi-kepulauan-bangka-belitung> pada 24 Maret 2024 Pukul 19:00 WIB.

² Dpmpd.kaltimprov.go.id.2018. Jauhar ingatkan Pemekaran Desa harus Sesuai tujuan. Melalui <https://dpmpd.kaltimprov.go.id/artikel/jauhar-ingatkan-pemekaran-desa-harus-sesuai-tujuan> pada 24 Maret 2024 Pukul 00:12 WIB.

pemekaran wilayah dari setiap desa yang ada hampir sama yaitu dari segi sumber daya manusia yang kurang, pembangunan desa yang tidak merata, akses pelayanan publik yang lambat, pemerataan ekonomi yang kurang baik. Oleh karena itu, perlu adanya perencanaan yang matang dan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah untuk mengatasi masalah-masalah tersebut demi meningkatkan kualitas hidup Masyarakat. Pemekaran wilayah sendiri menjadi salah satu Upaya dalam menangani isu seperti Tata kelola yang kurang baik di tingkat nasional atau lokal karena adanya penyempitan wilayah dengan tujuan utama untuk kesejahteraan Masyarakat.³

Menurut Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri R. Gani Muhammad Pemekaran daerah merupakan cara atau pendekatan untuk mempercepat akselerasi Pembangunan daerah dan daerah otonom yang terbentuk itu merupakan entitas baik sebagai kesatuan geografis, politik, ekonomi, sosial dan budaya sehingga membuat pemekaran menjadi bahasan yang menarik untuk dikaji.⁴ Berdasarkan pasal 32 UU No. 23 tahun 2014 tentang pemekaran daerah menentukan bahwa pembentukan daerah berupa pemekaran daerah dan penggabungan daerah sehingga dapat diketahui bahwa pembentukan daerah dapat dilakukan dengan pembentukan daerah melalui pemekaran daerah dan pembentukan daerah melalui penggabungan daerah.⁵

³ Ombudsman. 2024. Dampak Pemekaran Wilayah terhadap Tata Kelola Pelayanan Publik. Melalui <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--dampak-pemekaran-wilayah-terhadap-tata-kelola-pelayanan-publik> Pada 18 September 2024 pukul 23:40 WIB

⁴ Mkri.id. 2020. Pemekaran Daerah, wujud pelayanan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16294&menu=2> pada 24 maret 2024 pukul 19:20 WIB

⁵ Herman Kambuno. 2017. *Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Skripsi*. Universitas Tadulako

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengatakan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara.⁶ Adanya UU Nomor 3 tahun 2024 tentang desa membuka ruang bagi desa untuk mengembangkan desa yang dimiliki namun pemerintahan provinsi juga telah melakukan penataan desa terlebih dahulu yakni mencakup pembentukan, penghapusan, penggabungan dan penetapan desa demi mewujudkan Manajemen Pemerintahan Nagari yang lebih baik seperti efektivitas penyelenggaraan desa, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata Kelola desa dan meningkatkan Pembangunan desa.

Manajemen Pemerintahan yang baik akan mempengaruhi baik buruknya tata kelola pemerintahan daerah, oleh sebab itu haruslah berfokus pada perubahan struktural dan dinamika politik sosial, maksud dari perubahan struktural menjelaskan Proses ini melibatkan perubahan dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, sosial, dan politik. Selain itu, perubahan kelembagaan juga menjadi kunci dalam mencapai tata kelola yang baik. Reformasi kelembagaan, baik melalui perubahan regulasi maupun penataan ulang institusi, bertujuan untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dengan kata lain, tata kelola yang baik tidak hanya tentang aturan dan prosedur, tetapi juga tentang bagaimana aturan tersebut diterapkan dalam konteks

⁶ Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 perubahan kedua atas UU Nomor 6 Tahun 2014

sosial dan politik yang dinamis.⁷

Manajemen secara umum dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya (baik manusia, keuangan, fisik, maupun informasi) suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.⁸ selaras dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang desa juga mendefinisikan perencanaan nagari adalah proses pengelolaan urusan pemerintahan, pengembangan masyarakat untuk kepentingan masyarakat umum.

Dalam konteks pemekaran Menurut George R. Terry dalam bukunya *Principles of Management* mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain.⁹ Selain itu Sadu Wasistiono juga mengatakan Manajemen mencakup pengelolaan sumber daya dan aktivitas pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan, menekankan pentingnya perubahan struktural, kultural, dan fungsional demi efektivitas dan efisiensi.

Manajemen pemerintahan berupa proses perencanaan, pengelolaan sistem pemerintahan yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan masyarakat mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, pengorganisasian,

⁷ Subandi. 2011. *Ekonomi Pembangunan*. Jakarta: Alfabeta

⁸ Laili, I. 2016. Manajemen sumber daya manusia.

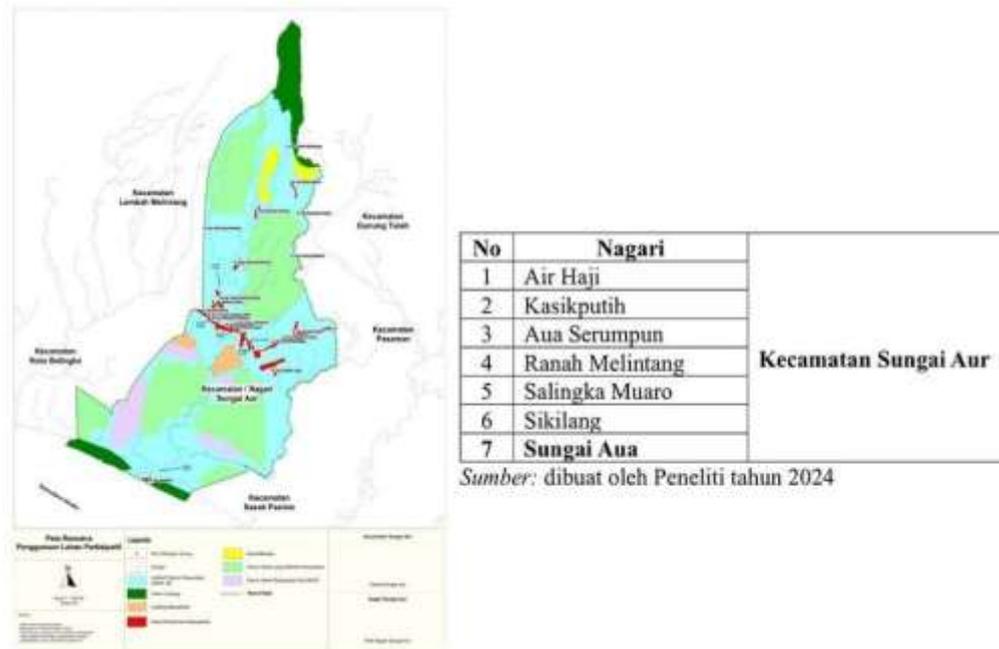
⁹ Hestanto web id. Pengertian manajemen menurut George R. Terry. 2024. Melalui <https://www.hestanto.web.id/teori-manajemen-menurut-george-r-terry/> pada 20 Juli 2025 pukul 23:42 WIB

pelaksanaan, hingga pengawasan. Sadu Wasistiono mengatakan terdapat lima aspek yang cenderung berubah dalam manajemen pemerintahan daerah yaitu sumber daya manusia (SDM), perencanaan, keuangan, logistik dan konflik. Perubahan pada aspek-aspek ini menuntut adaptasi yang cepat dan inovatif dalam manajemen pemerintahan daerah, manajemen yang baik akan menghasilkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkeadilan.¹⁰

Salah satu daerah yang mengalami pemekaran di Kabupaten Pasaman Barat adalah Kecamatan Sungai Aur. Pelaksanaan pemekaran ini sejalan dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 47 Tahun 2022 tentang penataan wilayah kejurongan yang bertujuan untuk mengatur ulang batas-batas wilayah kejurongan di Kabupaten Pasaman Barat.¹¹ Pemekaran dan penataan wilayah diharapkan dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat setempat, antara lain melalui peningkatan akses pelayanan publik, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Tujuan utamanya adalah untuk dapat mewujudkan manajemen pemerintahan daerah yang lebih baik dan berkeadilan.

¹⁰ Sadu Wasistiono. 2001. Kapita Selekta Manajemen Pemerintah Daerah. Alqaprint. Bandung.

¹¹ Perbup Kabupaten Pasaman Barat Nomor 47 Tahun 2022 tentang Penataan wilayah Kejurongan



Gambar 1.1
Peta Nagari di Kecamatan Sungai Aur

Berdasarkan Gambar 1.1 terlihat beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat salah satunya Kecamatan Sungai Aur yang turut serta melaksanakan pemekaran dimana Kecamatan Sungai Aur semula hanya memiliki satu Nagari yaitu Nagari Sungai aua kemudian dimekarkan pada tahun 2022 menjadi 7 nagari.¹² Dalam konteks pemekaran, tata kelola nagari Sungai Aua yang semula berjalan dalam suatu kesatuan wilayah kini harus beradaptasi dengan kondisi baru. Pembagian aset, kewenangan, dan sumber daya yang tidak merata seringkali memicu persoalan baru dalam pengelolaan pemerintahan.

¹² Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat. 2022. Profil Nagari Sungai Aua. Diakses dari <https://nagarisungaiaur.pasamanbaratkab.go.id/page/Profil%20Nagari%20Sungai%20Aua> pada 27 Maret 2024 Pukul 20:00 WIB

Permintaan akan Sumber daya manusia yang kompeten meningkat tajam, sementara kapasitas yang ada mungkin belum memadai. Proses perencanaan pun menjadi lebih kompleks karena harus mengakomodasi kebutuhan masing-masing nagari baru. Selain itu Alokasi anggaran yang terbatas dan mekanisme pembagian yang belum jelas dapat memicu konflik kepentingan. Demikian pula dengan pengelolaan aset dan logistik yang memerlukan penyesuaian akibat dilaksanakannya pemekaran.

Penelitian terkait Dampak Pemekaran terhadap manajemen pemerintahan memberikan ketertarikan dalam lingkup penelitian. Terdapat beberapa studi terkait Dampak pemekaran penelitian Pertama dari Bani Mulia dengan judul “Dampak Pemekaran Nagari dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat”.¹³ Kedua Penelitian Wulan Sundari berjudul “Analisis pemekaran di desa tambak tinggi pasca pemekaran desa tambak tinggi kecamatan Depati VII terhadap pembangunan infrastruktur”.¹⁴ Ketiga Penelitian Mariam d. Poma dkk yang berjudul “Dampak pelaksanaan pemekaran kecamatan dalam meningkatkan pembangunan daerah”.¹⁵

Keempat Penelitian Muhammad Izzudin Nasrullah yang berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Pemekaran Desa (Studi Desa Rempek Darussalam

¹³ Beni Mulia. 2018. Dampak Pemekaran Nagari Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Kepada Masyarakat Nagari Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang Kabupaten Pasaman Barat.

¹⁴ Wulan Sundari.2020. Analisis Pemekaran di Desa Tambak Tinggi Pasca Pemekaran Desa Tambak Tinggi Kecamatan Depati VII Terhadap Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Administrasi Mahasiswa*, 2(10), 81-90.

¹⁵ Mariam D Poma dkk. 2021. Dampak Pelaksanaan Pemekaran Kecamatan dalam Meningkatkan Pembangunan Daerah. *Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 7(4), 115-122.

Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara 2019)".¹⁶ Kelima, Penelitian Jumadi berjudul "Analisis dampak pemekaran desa terhadap pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat (studi kasus desa Budi mufakat kecamatan bataguh kabupaten Kapuas)".¹⁷ Keenam Penelitian Noviana Nur berjudul "Dampak pemekaran desa terhadap percepatan dan pemerataan pembangunan (studi di desa sorisakolo kecamatan Dompu kabupaten Dompu)".¹⁸ Ketujuh, Penelitian Nurhida Hayani berjudul "Efektivitas Pemekaran Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat".¹⁹

Adapun penelitian-penelitian yang telah peneliti kelompokkan, peneliti terdahulu terfokus pada Pembangunan infrastruktur, dampak pemekaran terhadap partisipasi Masyarakat, dampak pelayanan publik, serta efektivitas pelayanan publik pasca pemekaran, akan tetapi terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, keterbaruan dari penelitian ini terletak pada fokus yang mendalam terhadap manajemen pemerintahan nagari yang merupakan aspek fundamental dalam perencanaan dan pengelolaan pemerintahan lokal. Mengedepankan analisis lebih komprehensif mengenai manajemen pemerintahan nagari pasca pemekaran, yang mencakup berbagai dimensi yang lebih luas.

¹⁶ Muhammad Izzudin Nasrullah. 2021. Partisipasi Masyarakat dalam Pemekaran Desa (Studi Desa Rempek Darussalam Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara 2019). Universitas Muhammadiyah Mataram

¹⁷ J, jumadi. 2022. Analisis Dampak Pemekaran Desa Terhadap Pembangunan Infrastruktur dan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Desa Budi Mufakat Kecamatan Bataguh Kabupaten Kapuas).

¹⁸ Noviana Nur. 2020. Dampak Pemekaran Desa Terhadap Percepatan dan Pemerataan Pembangunan (*Studi di Desa Sori Sakolo Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu*) Skripsi. Universitas Muhammadiyah Mataram.

¹⁹ Nurhida Hayani. 2022. Efektivitas Pemekaran Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat (Doctoral dissertation, Universitas Andalas).

Penelitian ini menggunakan kerangka lima aspek yang cenderung berubah pada manajemen pemerintahan daerah menurut Sadu Wasistiono, yang mencakup Sumber Daya Manusia (SDM), Perencanaan, Keuangan, Logistik, dan Konflik. Fokus pada manajemen pemerintahan di nagari berangkat dari pemahaman bahwa pemekaran nagari membawa perubahan signifikan dalam struktur dan mekanisme pemerintahan yang perlu dikelola dengan baik agar tujuan pemekaran tercapai, yaitu peningkatan pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya yang lebih efisien.

I.2 Rumusan Masalah

Kabupaten Pasaman Barat merupakan Kabupaten yang termasuk dalam 5 Kabupaten terluas di Sumatera Barat dengan luas wilayahnya mencapai 3.887,77 km² dengan jumlah penduduk sekitar 443.722 ribu jiwa.²⁰ Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari 11 kecamatan dengan sebaran 19 nagari di 11 kecamatan. Kondisi ini menjadi alasan kurang terkontrolnya pemerataan Pembangunan karena kepadatan penduduk yang nantinya akan semakin bertambah sehingga sulitnya pemerintah untuk memperhatikan Pembangunan di nagarinya. Pemekaran wilayah Kabupaten Pasaman Barat sendiri ditemukan adanya 5 nagari yang hanya memiliki 1 nagari sehingga 4 diantara 5 nagari ini mengajukan pemekaran.

²⁰ Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat tahun 2022

Tabel 1. 1
Daftar kecamatan yang terdiri dari satu nagari dan mengusulkan Pemekaran

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah Penduduk (ribu)
1	Koto Balingka	340, 78	31. 442
2	Sungai Aur	420, 16	38. 511
3	Lembah Melintang	263, 77	50. 257
4	Sasak Ranah Pasisie	123, 71	15. 200

Sumber: Dokumen proposal pemekaran Nagari Sungai Aua

Berdasarkan tabel 1.1 , menunjukkan nagari Sungai Aua memiliki luas wilayah yang paling besar dengan jumlah penduduk menempati nomor dua. Hal ini mengindikasikan adanya potensi ketidakmerataan dalam distribusi Pembangunan sehingga pemekaran yang direncanakan diharapkan mampu mengatasi permasalahan ini dengan pemerataan Pembangunan baik fisik maupun non fisik. Oleh karena itu dilaksanakannya pemekaran wilayah dengan tujuan mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan pelayanan publik bagi Masyarakat dan diharapkan dapat lebih mendekatkan pemerintah dengan Masyarakat.²¹

Kecamatan Sungai Aur Merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat yang melaksanakan Pemekaran. Prosedur dalam Pemekaran

²¹ Berita Pasaman Barat. 2024. Bupati Hamsuardi tegaskan pemekaran wilayah kejurongan hanya pemekaran pemerintahan, bukan pemecah adat dan tradisi. Diakses melalui <https://pasamanbaratkab.go.id/news/bupati-hamsuardi-tegaskan-pemekaran-wilayah-kejurongan-hanya-pemekaran-pemerintahan-bukan-pemecah-adat-dan-tradisi> pada 26 Agustus 2024 Pukul 15:35

Nagari sendiri diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 melalui 2 persyaratan yaitu persyaratan dasar dan persyaratan administratif, Selain itu UU No. 23 Tahun 2014 juga menentukan bahwa apabila satu daerah akan dimekarkan, maka daerah tersebut harus melalui tahapan daerah persiapan.²² Prosedur Pemekaran dalam UU No. 23 Tahun 2014 Sudah sejalan dengan fakta yang ada pada Kecamatan Sungai aur. Kecamatan Sungai Aur awal mulanya hanya terdiri dari satu nagari kemudian dilakukan tahap pemekaran dengan membentuk 1 nagari induk yaitu Nagari Sungai Aua dan 6 nagari persiapan.

Pemekaran di Kecamatan Sungai aur resmi dilakukannya pada tahun 2022 dengan jumlah nagari yang dimekarkan 7 Nagari dengan Nagari induk. Pemekaran Nagari Sungai Aur sendiri di latar belakang oleh berbagai faktor seperti Pertumbuhan penduduk yang pesat, Luas wilayah yang luas serta Pemerataan pembangunan yang belum optimal. Dilaksanakannya pemekaran tentunya akan mengubah tatanan pemerintahan sehingga, pembagian tugas dan fungsi, jabatan, alokasi anggaran harus disesuaikan dengan kondisi baru dengan tujuan agar mempercepat pembangunan.

Pemekaran Wilayah khususnya pada nagari induk menjadi salah satu upaya menangani isu seperti kurang efektifnya manajemen pemerintahan di tingkat nagari sehingga dapat dikatakan sebagai langkah strategis dalam mengoptimalkan kendali dengan wilayah yang sempit untuk kesejahteraan Masyarakat.²³ Dengan membagi wilayah yang luas dan beragam menjadi unit-unit

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah.

²³ Ibid hal.2

pemerintahan yang lebih kecil diharapkan perencanaan pemerintahan nagari dapat berjalan lebih optimal dan dapat terakomodasi dengan lebih baik. Oleh karena itu perlu langkah awal dilakukan analisis mendalam terhadap perubahan luas wilayah dan jumlah penduduk sebelum dan sesudah pemekaran dengan tujuan melihat perubahan yang terjadi.

Tabel 1. 2
Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Sebelum dan Sesudah Pemekaran di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur

No	Luas Wilayah dan Jumlah Nagari	Sebelum Pemekaran (Hanya 1 Nagari)			Sesudah Pemekaran (Khusus Nagari Sungai Aua)	
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Luas Wilayah	420, 16 km ² (100%)	420, 16 km ² (100%)	47, 172 km ² (11,28%)	47, 172 km ² (11,28%)	47, 172 km ² (11,28%)
2	Jumlah Penduduk	35.466 Jiwa (100%)	36.375 Jiwa (100%)	8.869 Jiwa (24,3 %)	9.320 jiwa (25,65%)	9.900 Jiwa (27,2%)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kecamatan Sungai Aur

Berdasarkan tabel 1.2 Pemekaran Nagari Sungai Aua telah menghasilkan redistribusi wilayah. Sebelum pemekaran, nagari sungai aua mencakup 1 wilayah saja seluas 420, 16 km² dengan persentase 100% dengan satu kesatuan administratif yang mengelola semua kebutuhan masyarakat. Setelah pemekaran, luas wilayah mengalami pengurangan menjadi 47, 172 km² dengan persentase 11,28% yang terdiri dari 1 nagari saja yaitu nagari sungai aua karena terbentuknya nagari-nagari baru yang dulunya merupakan bagian dari nagari induk, dengan luasan wilayah yang lebih terbatas, pengelolaan nagari baik untuk sumber daya manusianya, perencanaannya, anggarannya serta dapat lebih difokuskan sesuai dengan kebutuhan spesifik tiap wilayah, sehingga mampu memberikan dampak

yang lebih signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Dari segi demografi, jumlah penduduk Nagari Sungai Aur sebelum pemekaran mencapai 36.375 Jiwa dengan persentase 100% untuk satu Nagari saja dan kebutuhan pelayanan yang beragam. Namun, setelah pemekaran, terjadi redistribusi populasi, sehingga jumlah penduduk di nagari induk berkurang terakhir di tahun 2024 tercatat menjadi 9.900 Jiwa dengan persentase 27,2% yang ikut berubah karena saat ini hanya untuk satu nagari saja yaitu nagari induk. Sebagian penduduk menjadi bagian dari nagari baru yang mengurangi jumlah penduduk di Nagari Induk. Hal ini memungkinkan fokus pengelolaan Nagari lebih diarahkan pada masyarakat yang lebih kecil namun dengan perencanaan yang lebih matang.

Penurunan jumlah penduduk dan luas wilayah Nagari induk setelah pemekaran secara teoritis memberikan peluang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam tata kelola nagari. Namun, untuk mengukur sejauh mana peningkatan efisiensi tersebut tercapai, diperlukan juga melihat persentase indeks ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan yang disederhanakan dalam Indeks desa membangun (IDM) sebagai bukti nyata apakah pembagian wilayah administrasi mampu meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai dampak dari pemekaran. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat pembangunan dan kemajuan suatu nagari dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya baik dari segi sosial, ekonomi dan lingkungan.

Tabel 1.3
Persentase nilai Indeks Desa Membangun di 7 Nagari Kecamatan Sungai Aur

No	Nagari	Sebelum			Sesudah		Status IDM
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Air Haji				0,5997	0,6019	Nagari Berkembang
2	Kasih Putih				0,7016	0,7035	
3	Aua Sarumpun				0,6981	0,6825	
4	Ranah Malintang				0,7058	0,7003	
5	Salingka Mauro				0,6984	0,7040	
6	Sikilang				0,5562		Nagari Tertinggal
7	Sungai Aua	0,8046	0,8782	0,7919	0,8440	0,8494	

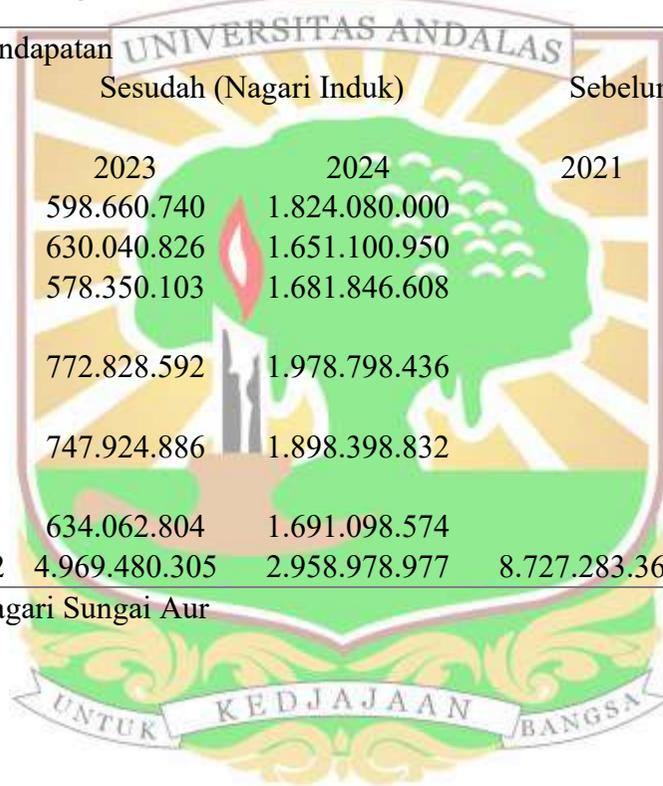
Sumber: Data Sekunder Kantor Wali Nagari Sungai Aur

Berdasarkan persentase IDM yang telah dijabarkan, terlihat adanya perbedaan yang signifikan. Dari tabel tersebut, dari sisi persentase IDM Nagari, 6 nagari selain nagari sungai aua memiliki IDM 0,5562 hingga 0,8494 dengan status IDM yang masih berkembang. Sedangkan, nagari sungai aua memiliki IDM yang lebih unggul dibandingkan nagari lainnya dengan IDM sesudah pemekaran mencapai IDM 0,8494 selain itu, pasca pemekaran nagari Sungai aua berhasil mempertahankan status IDM Nagari maju bahkan setelah pemekaran naik ke kategori nagari mandiri. Peningkatan signifikan ini mengindikasikan bahwa pemekaran telah memberikan dampak positif terhadap manajemen pemerintahan di Nagari Sungai Aua, yang ditandai dengan optimalisasi alokasi sumber daya, peningkatan investasi infrastruktur, dan penguatan kapasitas aparatur.

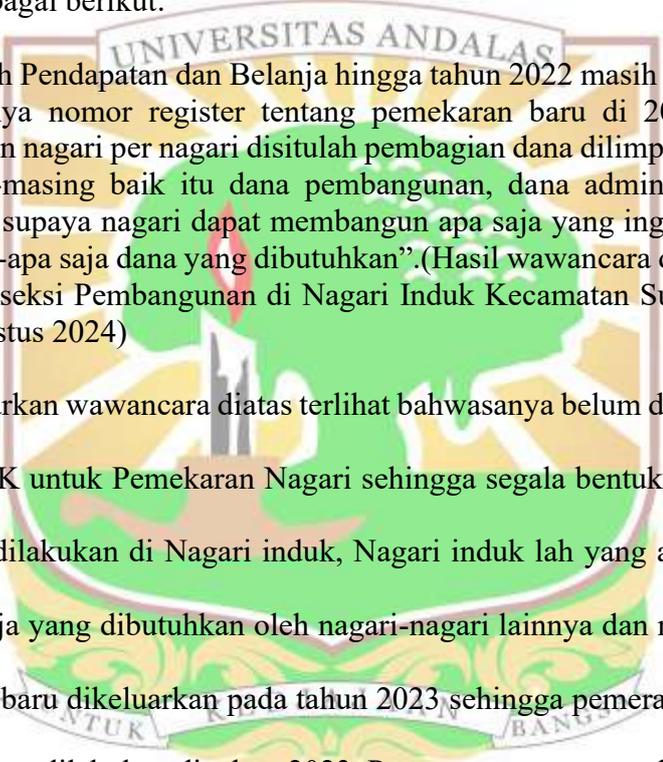
Tabel 1. 4
Anggaran Pendapatan dan Belanja Sebelum dan Sesudah Pemekaran di 7 Nagari Kecamatan Sungai Aur

No	nagari	Pendapatan				Belanja			
		Sebelum (7 Nagari)		Sesudah (Nagari Induk)		Sebelum (7 Nagari)		Sesudah (Nagari Induk)	
		2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	Air Haji			598.660.740	1.824.080.000			598.660.740	1.001.857.684
2	Kasik Putih			630.040.826	1.651.100.950			630.508.826	1.729.110.318
3	Aua			578.350.103	1.681.846.608			461.409.213.	1.768.427.846.
4	Sarumpun								
4	Ranah			772.828.592	1.978.798.436			772.828.592	1.979.151.508.
5	Malintang								
5	Salingka			747.924.886	1.898.398.832			747.924.886	1.944.851.166
6	Mauro								
6	Sikilang			634.062.804	1.691.098.574			634.062.804	1.772.712.540
7	Sungai Aua	8.161.617.411	7.867.870.652	4.969.480.305	2.958.978.977	8.727.283.368	8.150.499.619	5.679.225.335	3.410.259.614

Sumber: Data Sekunder Kantor Wali Nagari Sungai Aur



Berdasarkan Tabel diatas terlihat Anggaran Pendapatan dan Belanja di Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat sebelum dan sesudah pemekaran. Sebelum dijelaskan secara detail perlu diketahui bahwasanya Pemekaran Kecamatan Sungai Aur dilaksanakan memang pada tahun 2022 namun untuk semua anggaran hingga tahun 2022 masih berada pada nagari induk. Sejalan dengan yang disampaikan Aljumar selaku Kepala Seksi Pembangunan di Nagari Sungai Aua sebagai berikut:



“Seluruh Pendapatan dan Belanja hingga tahun 2022 masih di nagari induk. Keluarnya nomor register tentang pemekaran baru di 2023 pembagian anggaran nagari per nagari disitulah pembagian dana dilimpahkan ke nagari masing-masing baik itu dana pembangunan, dana administrasi gaji dan lainnya supaya nagari dapat membangun apa saja yang ingin dibangunnya dan apa-apa saja dana yang dibutuhkan”.(Hasil wawancara dengan Aljumar Kepala seksi Pembangunan di Nagari Induk Kecamatan Sungai Aua Pada 22 Agustus 2024)

Berdasarkan wawancara diatas terlihat bahwasanya belum dikeluarkannya nomor induk SK untuk Pemekaran Nagari sehingga segala bentuk anggaran dan belanja masih dilakukan di Nagari induk, Nagari induk lah yang akan membagi per *item* apa saja yang dibutuhkan oleh nagari-nagari lainnya dan nomor register SK pemekaran baru dikeluarkan pada tahun 2023 sehingga pemerataan anggaran di tiap nagari baru dilakukan di tahun 2023. Pemerataan anggaran dilakukan guna agar tiap nagari yang telah dimekarkan dapat mengurus pembangunan apa saja yang ingin di bangun dan Anggaran dana apa saja yang ingin dikeluarkan.

Dari sisi keuangan, anggaran pendapatan dan belanja antara nagari induk dengan enam nagari persiapan menunjukkan disparitas yang signifikan, nagari induk mengalami peningkatan anggaran yang cukup signifikan pasca pemekaran. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor. Pertama, status nagari induk

sebagai pusat administrasi, memberikan akses yang lebih mudah terhadap sumber daya dan dukungan teknis dari pemerintah daerah sebab dulunya memang seluruh anggaran berada di nagari induk. Kedua, Indeks Desa Membangun (IDM) yang lebih baik, yang mencerminkan potensi dan kebutuhan pembangunan yang lebih tinggi di nagari induk. Sebagai pusat administrasi, nagari induk juga mendapatkan prioritas dalam alokasi dana dari pemerintah pusat dan daerah, sehingga mampu mengelola anggaran dengan lebih efektif.

Peningkatan anggaran ini sejalan dengan konsep Sadu Wasistiono, yang menitikberatkan pada pentingnya pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien dalam pemerintahan daerah. Dalam konteks ini, Peningkatan anggaran dan belanja nagari sungai aua mengindikasikan perbaikan tata kelola nagari terutama dalam perencanaan keuangan setelah pemekaran sudah lebih difokuskan untuk satu nagari saja selain itu, dengan alokasi anggaran yang lebih besar, nagari induk dapat meningkatkan kapasitas SDM-nya melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan, yang penting untuk mengelola dana secara efektif dan efisien. Peningkatan anggaran ini memungkinkan nagari induk untuk memperkuat struktur organisasi pemerintahan, sehingga dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Setelah menganalisis data APB Nagari, perhatian juga perlu diberikan pada partisipasi masyarakat sebagai salah satu dampak dari adanya perubahan tata kelola pemerintahan nagari dimana sangat bergantung dengan peranan pemerintah dan masyarakat. Tanpa adanya keterlibatan masyarakat pemerintah tidak akan

mencapai hasil yang optimal.²⁴ Keterlibatan ini dapat dilihat dalam kehadiran Musrenbang. Musrenbang merupakan forum penting bagi warga untuk berkontribusi dalam proses perencanaan pembangunan di nagari. Sejalan dengan hasil wawancara peneliti dengan Linda selaku Koordinator perencanaan nagari sungai aua sebagai berikut:

“Setelah diadakannya pemekaran, untuk partisipasi masyarakat sekarang memang lebih baik sekarang masyarakat kalau diundang untuk bermusyawarah lebih antusias serta kegiatan yang dilakukan nagari Masyarakat juga lebih support”.²⁵

Kemudian pernyataan ini dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Joni Martawon sebagai DA'I di Nagari Sungai Aua sebagai berikut:

“Untuk kinin alhamdulillah lah nampak perubahan non datang untuk ikut kegiatan musrembang, non biasonyo di aula ko langang kini lah agak rami bahkan kursi non dulu banyak kosong kini lah rami toisi bahkan uang bangku”. (Wawancara Joni Martawon selaku DA'I di Nagari Sungai Aua Pada 26 September 2024)

(Terjemahannya, “Untuk saat sekarang alhamdulillah sudah terlihat perubahan untuk kehadiran masyarakat dalam kegiatan musrembang, biasanya di aula terlihat sepi sekarang sudah cukup ramai bahkan kursi yang dulu banyak kosong sekarang sudah ramai terisi bahkan kurang.”

Berdasarkan Pernyataan diatas, menunjukkan dilaksanakannya pemekaran ternyata berdampak baik untuk tingkat kehadiran dalam berpartisipasi di kegiatan Musrembang Nagari sebab sejatinya Masyarakat memiliki pengaruh besar terhadap keputusan pembangunan yang diambil. Hal ini mengindikasikan bahwa partisipasi aktif masyarakat dalam Musrembang pasca pemekaran adalah salah satu bentuk

²⁴Bappeda Temanggung. 2017. Pentingnya Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan. Melalui https://bappeda.temanggungkab.go.id/frontend/d_informasi/203 pada 19 September 2024 pukul 23:00 WIB

²⁵ Wawancara online dengan Linda Koordinator Perencanaan Nagari Sungai Aua pada 14 Agustus 2024

respons terhadap perubahan yang terjadi, serta berkontribusi terhadap pengembangan tata Kelola pemerintahan di Nagari Sungai Aua.

Setelah disajikan latar belakang dan rumusan masalah diasumsikan alasan dilaksanakannya pemekaran di Nagari Sungai aua sendiri karena jumlah penduduknya padat dengan luas wilayah terluas dibanding 3 kecamatan terdiri dari 1 nagari yang melakukan pemekaran kemudian, pemekaran Nagari induk diasumsikan berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat yang dilihat dari adanya pengurangan luas wilayah dan jumlah penduduk dapat diinterpretasikan sebagai upaya untuk meningkatkan fokus dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya dengan kata lain meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Terbentuknya wilayah yang lebih kecil, nagari induk dapat lebih mudah mengakses dan melayani masyarakat, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, berkurangnya beban administrasi akibat penurunan jumlah penduduk memungkinkan nagari induk untuk mengalokasikan sumber daya yang lebih besar pada kegiatan-kegiatan yang bersifat strategis, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), penyusunan perencanaan yang lebih baik, dan pengelolaan keuangan yang lebih efisien. Selain itu Peningkatan persentase IDM dan APB Nagari Sungai menjadi bukti empiris bahwa asumsi tersebut benar adanya. Maka pertanyaan peneliti pada penelitian ini adalah “ Bagaimana dampak Pemekaran terhadap Manajemen Pemerintahan di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis dampak pemekaran terhadap Manajemen pemerintahan di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah, sebagai berikut :

1. Secara Akademis

Dalam bidang akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan sebagai bahan atau referensi dalam memahami Dampak dari Pemekaran Terhadap Manajemen Pemerintahan di Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk mempertahankan atau perbaikan terhadap manajemen pemerintahan di tingkat nagari, sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

